AL-DYAS
Jurnal Inovasi dan Pengabdian kepada Masyarakat

p-ISSN : 2964-4992
e-ISSN : 2964-4984

Terindeks : Dimensions, Scilit, Lens, Crossref, Semantic, Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/aldyas.v5i2.9572

EVALUASI KEBIJAKAN PENYEDIAAN JALAN USAHA TANI DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN DAN KESEJAHTERAAN PETANI DI NAGARI LANSEK KADOK BARAT

Evaluation of the Policy for Providing Farm Access Roads in Meeting the Needs and Welfare of Farmers in Nagari Lansek Kadok Barat

Sahriana & Putri Febri Wialdi
Universitas Negeri Padang
sahriana320@gmail.com; putrifwialdi@fis.unp.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Mar 4, 2026	Apr 1, 2026	Apr 13, 2026	Apr 18, 2026

Abstract

Jalan Usaha Tani (JUT) is an important infrastructure in supporting the smooth operation of agricultural activities and improving farmers' welfare, but its provision in Nagari Lansek Kadok Barat has not been implemented optimally, thereby causing various problems for the farming community. This study aims to evaluate the policy for the provision of JUT based on Law Number 19 of 2013 and Minister of Agriculture Regulation Number 52 of 2018, to identify the inhibiting factors in its implementation, and to analyze its impact on fulfilling farmers' needs and welfare. This study used a descriptive qualitative approach with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The research informants included nagari officials, subdistrict authorities, farmer groups, and farmers, while data analysis was conducted using an interactive model consisting of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that, conceptually, the policy for the provision of JUT had been understood and planned participatively, but its implementation had not been optimal due to budget limitations, the priority use of village funds, the lack of

Al-DYAS is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

support from the regency government, and dependence on external assistance. These conditions affected difficulties in agricultural activities, increased transportation costs, dependence on middlemen, and declining farmers' income and welfare. These findings affirm that the effectiveness of the JUT provision policy requires increased budgetary support and strengthened intergovernmental synergy so that agricultural infrastructure development can be implemented more effectively and equitably to support farmers' welfare.

Keywords: *Jalan Usaha Tani*; Policy Evaluation; Agricultural Infrastructure; Farmers' Welfare; Rural Development

Abstrak: Jalan Usaha Tani (JUT) merupakan infrastruktur penting dalam mendukung kelancaran aktivitas pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani, tetapi penyediaannya di Nagari Lansek Kadok Barat belum terlaksana secara optimal sehingga menimbulkan berbagai permasalahan bagi masyarakat petani. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan penyediaan JUT berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52 Tahun 2018, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat pelaksanaannya, serta menganalisis dampaknya terhadap pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan petani. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi aparatur nagari, pihak kecamatan, kelompok tani, dan petani, sedangkan analisis data dilakukan dengan model interaktif yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara konseptual kebijakan penyediaan JUT telah dipahami dan direncanakan secara partisipatif, tetapi implementasinya belum optimal karena keterbatasan anggaran, prioritas penggunaan dana desa, minimnya dukungan pemerintah kabupaten, serta ketergantungan terhadap bantuan eksternal. Kondisi tersebut berdampak pada kesulitan dalam aktivitas pertanian, meningkatnya biaya transportasi, ketergantungan terhadap tengkulak, serta menurunnya pendapatan dan kesejahteraan petani. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas kebijakan penyediaan JUT memerlukan peningkatan dukungan anggaran dan penguatan sinergi antarpemerintah agar pembangunan infrastruktur pertanian dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan merata untuk menunjang kesejahteraan petani.

Kata Kunci: Jalan Usaha Tani; Evaluasi Kebijakan; Infrastruktur Pertanian; Kesejahteraan Petani; Pembangunan Perdesaan

PENDAHULUAN

Kondisi infrastruktur Jalan Usaha Tani (JUT) yang belum memadai di Nagari Lansek Kadok Barat menunjukkan adanya ketimpangan antara kebijakan yang telah dirumuskan dengan implementasi di lapangan. Secara normatif, pemerintah telah mengatur kewajiban penyediaan prasarana pertanian melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013, namun realisasi di tingkat daerah masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta kurangnya prioritas pembangunan di sektor

pertanian (Indonesia, 2018). Dalam perspektif evaluasi kebijakan, kondisi ini dapat dikategorikan sebagai kegagalan implementasi kebijakan publik, di mana output kebijakan tidak mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Fauzan, 2024). Hal ini memperlihatkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusan, tetapi juga oleh efektivitas pelaksanaan di lapangan. Selain itu, faktor geografis seperti kondisi topografi yang berbukit turut memperburuk aksesibilitas jalan pertanian di wilayah tersebut. Dengan demikian, evaluasi terhadap kebijakan penyediaan JUT menjadi sangat penting untuk mengidentifikasi celah antara kebijakan dan praktik. Evaluasi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis dalam meningkatkan kualitas implementasi kebijakan ke depan (Jazuli et al., 2023).

Selain itu, keberadaan JUT yang tidak layak secara langsung berdampak pada efisiensi sistem distribusi hasil pertanian. Infrastruktur jalan yang rusak menyebabkan meningkatnya biaya transportasi, waktu tempuh yang lebih lama, serta risiko kerusakan hasil panen sebelum sampai ke pasar (Jayachandran, 2022). Dalam teori ekonomi pembangunan, akses terhadap infrastruktur merupakan faktor kunci dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi ekonomi di sektor pertanian (Todaro & Smith, 2022). Ketika akses jalan terbatas, maka petani akan menghadapi biaya transaksi yang tinggi sehingga margin keuntungan menjadi semakin kecil. Kondisi ini juga menyebabkan terjadinya ketergantungan terhadap tengkulak sebagai perantara distribusi hasil panen. Tengkulak memiliki keunggulan dalam hal akses transportasi dan modal, sehingga mampu mendominasi rantai distribusi. Akibatnya, posisi tawar petani menjadi lemah dalam menentukan harga jual hasil pertanian sehingga itu, pembangunan JUT yang memadai tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur fisik, tetapi juga sebagai instrumen peningkatan keadilan ekonomi bagi petani.

Lebih lanjut, dari perspektif kesejahteraan, kondisi JUT yang buruk turut mempengaruhi tingkat pendapatan dan kualitas hidup petani. Menurut konsep kesejahteraan petani yang dikemukakan oleh Mubyarto, kesejahteraan tidak hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga dari akses terhadap sarana produksi dan distribusi (Mubyarto, 2014). Infrastruktur jalan merupakan salah satu bentuk modal fisik yang sangat menentukan keberhasilan usaha tani. Ketika akses jalan tidak memadai, maka petani akan mengalami kesulitan dalam memperoleh input produksi seperti pupuk dan alat pertanian, serta dalam menjual hasil panen. Hal ini berdampak pada rendahnya produktivitas dan pendapatan petani. Selain itu, kondisi tersebut juga dapat meningkatkan tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan. Perbaikan JUT menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat agraris. Oleh

karena itu, kebijakan penyediaan JUT harus dievaluasi tidak hanya dari aspek fisik, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan petani.

Di sisi lain, permasalahan JUT di Nagari Lansek Kadok Barat juga mencerminkan lemahnya perencanaan pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat. Dalam pendekatan pembangunan partisipatif, masyarakat seharusnya dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pembangunan infrastruktur (Reddi & Yalamala, 2020). Namun, dalam praktiknya, seringkali pembangunan tidak sepenuhnya berdasarkan kebutuhan riil masyarakat di lapangan. Hal ini menyebabkan adanya ketidaksesuaian antara program yang direncanakan dengan kondisi yang dihadapi oleh masyarakat. Partisipasi petani dalam perencanaan pembangunan JUT sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, keterlibatan masyarakat juga dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap infrastruktur yang dibangun sehingga dapat menjaga keberlanjutannya. Maka dari itu, evaluasi kebijakan JUT juga perlu mempertimbangkan aspek partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan. Hal ini penting untuk mewujudkan pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyediaan JUT di Nagari Lansek Kadok Barat belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Hal ini ditandai dengan masih tingginya tingkat kerusakan jalan, meningkatnya biaya distribusi, serta rendahnya harga jual hasil panen yang diterima petani. Selain itu, ketergantungan terhadap tengkulak menunjukkan adanya ketidakefisienan dalam sistem distribusi hasil pertanian. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi kebijakan yang komprehensif untuk menilai sejauh mana kebijakan penyediaan JUT telah berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Evaluasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan penyediaan JUT berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52 Tahun 2018, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat pelaksanaannya, serta menganalisis dampaknya terhadap pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan petani di Nagari Lansek Kadok Barat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami secara mendalam fenomena evaluasi kebijakan penyediaan Jalan Usaha Tani (JUT) dalam memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan petani di Nagari Lansek Kadok Barat. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali makna, pengalaman, serta perspektif subjek penelitian secara komprehensif dalam konteks yang alamiah tanpa manipulasi variabel (Harahap, 2020). Penelitian deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran sistematis mengenai kondisi nyata di lapangan terkait implementasi kebijakan JUT. Dalam konteks ini, peneliti berupaya memahami bagaimana kebijakan tersebut dijalankan serta bagaimana dampaknya dirasakan oleh petani sebagai kelompok sasaran utama. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan dengan realitas implementasi di lapangan. Selain itu, metode kualitatif memberikan fleksibilitas dalam menggali data yang bersifat kontekstual dan dinamis sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Pendekatan ini sangat relevan digunakan untuk menilai efektivitas kebijakan publik di tingkat lokal. Melalui metode ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang utuh mengenai permasalahan infrastruktur pertanian yang dihadapi oleh petani.

Penelitian ini dilakukan selama dua bulan yaitu Januari sampai Februari 2026. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Nagari Lansek Kadok Barat, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat yang dipilih secara purposive dengan pertimbangan relevansi terhadap permasalahan penelitian. Sebagian besar masyarakat di wilayah ini berprofesi sebagai petani dan sangat bergantung pada keberadaan Jalan Usaha Tani dalam menunjang aktivitas produksi dan distribusi hasil pertanian. Informan dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang dianggap paling mengetahui permasalahan yang diteliti (Sugiyono, 2017). Informan penelitian terdiri dari pemerintah nagari, ketua kelompok tani, petani, serta pihak kecamatan yang memiliki keterkaitan langsung dengan kebijakan JUT. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan untuk menggali informasi terkait kondisi jalan usaha tani dan dampaknya terhadap kesejahteraan petani. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan, laporan Badan Pusat Statistik (BPS), serta literatur ilmiah yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi untuk memastikan kelengkapan dan validitas

data. Dengan kombinasi sumber data tersebut, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan akurat.

Dalam menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai informan yang memiliki perspektif berbeda terhadap kebijakan JUT. Triangulasi merupakan teknik yang efektif dalam meningkatkan kredibilitas data dengan cara memverifikasi kebenaran informasi melalui berbagai sumber (Lexy J Moleong, 2019). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyederhanakan dan memilih data yang relevan dengan fokus penelitian agar memudahkan proses analisis. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi yang sistematis untuk melihat pola dan hubungan antar informasi yang diperoleh. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan. Dalam proses analisis ini, peneliti juga menggunakan teori evaluasi kebijakan publik dari Dunn sebagai landasan untuk menilai efektivitas kebijakan JUT. Analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak proses pengumpulan data hingga tahap akhir penelitian.

HASIL

Evaluasi Kebijakan Penyediaan Jalan Usaha Tani di Nagari Lansek Kadok Barat

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, kajian ini berfokus pada evaluasi kebijakan penyediaan Jalan Usaha Tani (JUT) di Nagari Lansek Kadok Barat yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52 Tahun 2018. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan teori evaluasi kebijakan publik dari William N. Dunn yang membagi evaluasi ke dalam tiga aspek utama, yaitu evaluasi semu, evaluasi formal, dan evaluasi keputusan teoritis. Ketiga aspek ini digunakan untuk melihat sejauh mana kebijakan dipahami, diimplementasikan, serta berdampak terhadap masyarakat petani secara nyata.

1. Evaluasi Semu (*Pseudo Evaluation*)

Pada tahap evaluasi semu, penelitian berfokus pada bagaimana kebijakan dipahami oleh pelaksana di tingkat nagari serta bagaimana kondisi faktual di lapangan. Pemahaman aparatur pemerintah nagari menjadi indikator awal dalam melihat kesiapan implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa pemerintah nagari telah memiliki

pemahaman yang cukup baik mengenai pentingnya jalan usaha tani sebagai infrastruktur pendukung sektor pertanian. Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris Nagari, Hendrizal, yang menyatakan:

"Kebijakan penyediaan JUT yang tentunya bertujuan untuk akses pertanian supaya lancar yang memang sangat dibutuhkan oleh petani karena berdampak langsung kepada perekonomian para petani. Area pertanian jadi bisa dilintasi dengan lancar dan memudahkan masyarakat untuk membawa hasil panen sendiri serta untuk kelancaran mobilisasi alat-alat pertanian yang ada di area persawahan dan pertanian tersebut." (Wawancara, 28 Januari 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah nagari tidak hanya memahami kebijakan secara administratif, tetapi juga secara substantif. Jalan usaha tani dipandang sebagai kebutuhan mendasar yang berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa mayoritas masyarakat bergantung pada sektor pertanian, sehingga keberadaan infrastruktur pendukung menjadi sangat penting.

Selain itu, pemahaman tersebut juga tercermin dalam proses perencanaan pembangunan yang dilakukan melalui Musrenbang Nagari. Sosialisasi kebijakan tidak dilakukan secara khusus, tetapi terintegrasi dalam forum musyawarah tersebut. Dalam forum ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan mereka, termasuk usulan pembangunan jalan usaha tani. Hendrizal kembali menegaskan:

"Sosialisasi JUT itu dilakukan saat Musrenbang. Masyarakat diminta mengusulkan kebutuhan jalan di daerah masing-masing." (Wawancara, 28 Januari 2026)

Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan bersifat partisipatif, di mana masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan. Namun demikian, meskipun pemahaman dan mekanisme perencanaan sudah baik, kondisi faktual di lapangan menunjukkan permasalahan yang cukup serius.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, kondisi jalan usaha tani di Nagari Lansek Kadok Barat masih banyak yang belum layak. Jalan yang berlubang, licin, dan sulit dilalui terutama saat musim hujan menjadi kendala utama bagi petani. Hal ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 1. Kondisi Jalan Ketika Hujan

Pada gambar diatas memperlihatkan kondisi jalan usaha tani yang rusak, berlumpur, dan tidak rata. Dalam gambar tersebut terlihat kendaraan sulit melintas dan sebagian jalan tergenang air. Kondisi ini memperkuat hasil wawancara bahwa akses jalan masih menjadi hambatan utama dalam aktivitas pertanian. Lebih lanjut, kerusakan jalan ini ternyata telah berlangsung sangat lama. Salah satu informan menyebutkan bahwa kondisi tersebut sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan jalan usaha tani bersifat kronis dan belum mendapatkan penanganan yang optimal dari waktu ke waktu.

2. Evaluasi Formal (*Formal Evaluation*)

Pada tahap evaluasi formal, analisis difokuskan pada kesesuaian antara tujuan kebijakan dengan hasil implementasi di lapangan. Secara normatif, kebijakan penyediaan jalan usaha tani sudah tepat sasaran karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai petani. Namun dalam praktiknya, kebijakan tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang menjadi kendala utama dalam pembangunan. Sekretaris Nagari menyampaikan:

"Belum sepenuhnya sesuai karena pembangunan JUT belum bisa dilakukan secara menyeluruh akibat keterbatasan anggaran." (Wawancara, 28 Januari 2026)

Hal serupa juga disampaikan oleh petani:

"Kami masih kesulitan ke kebun karena jalannya belum bagus, apalagi saat hujan." (Wawancara, 05 Februari 2026)

Pernyataan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dan realitas di lapangan. Kebijakan memang ada, tetapi implementasinya belum maksimal.

Dari sisi pelaksanaan, pembangunan jalan usaha tani dilakukan secara bertahap dan lebih banyak berupa rehabilitasi. Misalnya, pembangunan di Jorong Beringin yang hanya mencakup sebagian wilayah.



Gambar 2. Pembangunan Jalan Secara Bertahap

Gambar diatas menunjukkan proses pembangunan jalan berupa pengecoran di salah satu titik. Dalam gambar tersebut terlihat bahwa pembangunan dilakukan secara terbatas dan belum mencakup seluruh wilayah.

Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran, baik dari dana desa maupun dari pemerintah daerah. Selain itu, adanya prioritas anggaran untuk sektor lain juga membuat pembangunan JUT tidak bisa difokuskan sepenuhnya. Meskipun demikian, dari sisi koordinasi antar lembaga, tidak ditemukan hambatan yang signifikan. Proses pengusulan telah berjalan sesuai mekanisme, mulai dari nagari hingga kabupaten.

3. Evaluasi Keputusan Teoritis (*Decision Theoretic Evaluation*)

Pada tahap ini, evaluasi difokuskan pada dampak kebijakan terhadap masyarakat. Salah satu dampak utama adalah terganggunya aktivitas pertanian akibat kondisi jalan yang tidak memadai. Salah satu petani menyampaikan :

"Ya JUT sangat penting, usaha tani itukan sangat bergantung pada akses kalau nggak ada jalan bagaimana kami mengeluarkan hasil, banyak pun hasil di kebun sana kalau ngga ada jalan pasti jadi satu masalah besar bagi kami petani ." (Wawancara, 28 Januari 2026)

Selain itu, kondisi jalan juga meningkatkan biaya transportasi. Kendaraan tidak bisa membawa muatan penuh sehingga harus bolak-balik. Dampak lainnya adalah meningkatnya ketergantungan petani terhadap tengkulak. Karena keterbatasan akses dan kendaraan, petani lebih memilih menjual hasil panen kepada tengkulak. Kondisi ini berdampak langsung terhadap pendapatan petani. Biaya meningkat, harga jual menurun, dan keuntungan menjadi lebih kecil.

Dalam hal dampaknya bisa dilihat dari berikut:

Tabel 1. Dampak Kondisi Jalan Usaha Tani terhadap Kesejahteraan Petani

No	Aspek Dampak	Kondisi Jalan Baik	Kondisi Jalan Rusak
1	Biaya Transportasi	Rendah	Tinggi
2	Akses ke Pasar	Mudah dan cepat	Sulit dan lambat
3	Harga Jual Produk	Lebih tinggi (langsung ke pasar)	Lebih rendah (melalui tengkulak)
4	Waktu Distribusi	Efisien	Tidak efisien
5	Ketergantungan Tengkulak	Rendah	Tinggi
6	Pendapatan Petani	Meningkat	Menurun

Sumber: Diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa kondisi Jalan Usaha Tani (JUT) memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan petani, terutama dalam hal ekonomi dan kesejahteraan. Pada kondisi jalan yang baik, biaya transportasi menjadi lebih rendah karena kendaraan dapat dengan mudah mengakses lahan pertanian dan pasar. Sebaliknya, pada kondisi jalan yang rusak, biaya transportasi meningkat akibat sulitnya akses dan tingginya risiko kerusakan kendaraan. Selain itu, akses pasar menjadi lebih terbatas sehingga petani kesulitan menjual hasil panen secara langsung. Hal ini berdampak pada harga jual produk yang cenderung lebih rendah karena petani bergantung pada tengkulak sebagai perantara. Dari sisi waktu distribusi, jalan yang baik memungkinkan proses distribusi berjalan lebih cepat dan efisien, sedangkan jalan yang rusak menyebabkan keterlambatan yang dapat menurunkan kualitas hasil panen. Kondisi tersebut juga meningkatkan ketergantungan petani terhadap

tengkulak yang memiliki akses transportasi lebih baik. Akibatnya, pendapatan petani menjadi lebih rendah dan kesejahteraan mereka tidak mengalami peningkatan yang signifikan.

Secara keseluruhan, kebijakan penyediaan jalan usaha tani di Nagari Lansek Kadok Barat sudah tepat secara tujuan dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Namun, implementasinya belum optimal karena keterbatasan anggaran dan belum meratanya pembangunan. Dampaknya sangat signifikan terhadap aktivitas pertanian, biaya operasional, ketergantungan terhadap tengkulak, serta pendapatan petani. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh perencanaan dan pemahaman, tetapi juga oleh dukungan sumber daya, terutama anggaran, serta konsistensi pelaksanaan di lapangan.

Faktor–Faktor Penyebab Belum Terlaksananya Penyediaan Jalan Usaha Tani Secara Optimal di Nagari Lansek Kadok Barat

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan berbagai informan, seperti Sekretaris Nagari Lansek Kadok Barat, pihak Kecamatan Rao Selatan, ketua kelompok tani, serta petani, ditemukan bahwa penyediaan Jalan Usaha Tani (JUT) di Nagari Lansek Kadok Barat belum terlaksana secara optimal. Dalam perspektif evaluasi kebijakan publik menurut William N. Dunn, suatu kebijakan dinilai berhasil apabila mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Namun, dalam praktiknya, implementasi kebijakan seringkali dihadapkan pada berbagai kendala struktural maupun teknis yang menyebabkan kebijakan tersebut belum berjalan secara maksimal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang saling berkaitan dan berkontribusi terhadap belum optimalnya penyediaan jalan usaha tani di wilayah tersebut.

Faktor pertama yang paling dominan adalah keterbatasan anggaran dana nagari. Jalan usaha tani merupakan infrastruktur yang sangat penting bagi masyarakat, khususnya petani, karena berfungsi sebagai akses utama menuju lahan pertanian, serta sebagai jalur distribusi hasil panen dan mobilisasi alat-alat pertanian. Namun demikian, pembangunan jalan usaha tani sangat bergantung pada kemampuan keuangan nagari yang terbatas. Dalam pelaksanaannya, setiap kegiatan pembangunan harus melalui perencanaan teknis berupa penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disusun oleh tenaga teknis nagari dengan pendampingan dari pendamping desa. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang dilakukan benar-benar disesuaikan dengan kondisi anggaran yang tersedia.

Hal tersebut ditegaskan oleh Sekretaris Nagari Lansek Kadok Barat, Hendrizal, yang menyatakan:

"JUT di Nagari Lansek Kadok Barat sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena berdampak langsung kepada perekonomian masyarakat. Namun pembangunan JUT itu disesuaikan dengan anggaran yang ada di nagari masing-masing. Sebelum jalan usaha tani dibuat, ada RAB yang dibuat oleh tenaga teknis nagari dan anggaran tersebut disesuaikan dengan dana yang ada di nagari." (Wawancara, 28 Januari 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun kebutuhan terhadap jalan usaha tani sangat tinggi, realisasi pembangunannya tetap bergantung pada kapasitas fiskal nagari. Dengan kata lain, keterbatasan anggaran menjadi faktor pembatas utama dalam pelaksanaan pembangunan.

Selain itu, keterbatasan anggaran ini juga dipengaruhi oleh adanya kebijakan efisiensi dan penyesuaian penggunaan dana desa. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi perubahan kebijakan yang menyebabkan alokasi dana desa untuk pembangunan fisik mengalami pengurangan. Akibatnya, sebagian besar anggaran lebih diprioritaskan untuk kebutuhan operasional pemerintahan nagari. Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari pihak kecamatan, yaitu Ibuk Meli:

"Karena setiap nagari itu beda-beda anggaran dana desanya, dan sekarang juga terjadi efisiensi anggaran. Jadi ada pengurangan dana untuk pembangunan fisik, dan lebih diprioritaskan dulu untuk operasional nagari. Kendala utamanya memang di anggaran yang belum mencukupi." (Wawancara, 29 Januari 2026)

Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran tidak hanya berasal dari tingkat nagari, tetapi juga dipengaruhi oleh kebijakan yang lebih luas di tingkat pemerintah daerah. Hal ini secara langsung berdampak pada lambatnya pembangunan jalan usaha tani.

Faktor kedua adalah adanya prioritas penggunaan dana desa dalam pembangunan nagari. Dana desa yang diterima oleh pemerintah nagari tidak hanya digunakan untuk pembangunan jalan usaha tani, tetapi juga harus dialokasikan untuk berbagai kebutuhan lainnya, seperti pembangunan infrastruktur umum, pemberdayaan masyarakat, serta kebutuhan operasional pemerintahan. Maka dari itu, pemerintah nagari harus menentukan skala prioritas dalam penggunaan anggaran setiap tahunnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun jalan usaha tani merupakan kebutuhan penting, namun tidak selalu menjadi

prioritas utama dalam setiap tahun anggaran. Akibatnya, pembangunan jalan usaha tani harus dilakukan secara bertahap dan tidak dapat menjangkau seluruh wilayah secara bersamaan.

Faktor ketiga adalah minimnya dukungan dari pemerintah kabupaten. Berdasarkan hasil wawancara dengan kelompok tani, diketahui bahwa mereka telah beberapa kali mengajukan proposal pembangunan jalan usaha tani kepada pemerintah daerah. Namun, hingga saat ini, proposal tersebut belum mendapatkan realisasi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara proses pengusulan dengan implementasi kebijakan di tingkat kabupaten. Ketua kelompok tani menyampaikan:

"Kami sudah beberapa kali buat proposal bersama kelompok lain, tapi belum dikabulkan sampai sekarang. Makanya jalan tetap rusak." (Wawancara, 02 Februari 2026)

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa upaya partisipatif dari masyarakat sebenarnya sudah dilakukan, namun belum diimbangi dengan tindak lanjut dari pemerintah kabupaten. Hal ini menyebabkan pembangunan jalan usaha tani belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Faktor keempat adalah ketergantungan terhadap bantuan pemerintah kabupaten dan provinsi. Keterbatasan anggaran di tingkat nagari menyebabkan pemerintah nagari dan masyarakat sangat bergantung pada bantuan dari pemerintah daerah yang lebih tinggi. Pembangunan jalan usaha tani membutuhkan biaya yang besar, sehingga sulit untuk dibiayai sepenuhnya oleh dana nagari. Hal ini menjelaskan bahwa terdapat harapan besar dari pemerintah nagari dan masyarakat terhadap dukungan pemerintah daerah. Ketergantungan ini muncul karena keterbatasan kemampuan nagari dalam membiayai pembangunan secara mandiri. Akibatnya, apabila bantuan dari pemerintah kabupaten tidak terealisasi, maka pembangunan jalan usaha tani akan terus mengalami keterlambatan.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa belum optimalnya penyediaan jalan usaha tani di Nagari Lansek Kadok Barat disebabkan oleh kombinasi beberapa faktor utama, yaitu keterbatasan anggaran, prioritas penggunaan dana desa, minimnya dukungan pemerintah kabupaten, serta ketergantungan terhadap bantuan dari pemerintah daerah. Keempat faktor ini saling berkaitan dan membentuk hambatan struktural yang menyebabkan kebijakan belum dapat diimplementasikan secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah nagari, kecamatan, dan kabupaten, serta peningkatan alokasi anggaran agar pembangunan jalan usaha tani dapat dilakukan secara lebih merata dan berkelanjutan.

Dampak Belum Terlaksananya Kebijakan Penyediaan Jalan Usaha Tani (JUT) terhadap Kesejahteraan Petani

Belum optimalnya penyediaan jalan usaha tani di Nagari Lansek Kadok Barat memberikan dampak nyata terhadap aktivitas dan kesejahteraan petani. Jalan usaha tani yang seharusnya menjadi akses utama menuju lahan pertanian justru dalam kondisi rusak, berlumpur, dan sulit dilalui, terutama saat musim hujan. Hal ini menyebabkan petani mengalami kesulitan dalam menjalankan aktivitas pertanian, baik dalam membawa sarana produksi maupun mengangkut hasil panen. Sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Nagari,

"Apabila JUT tidak mencukupi/memadai maka petani pun akan kesulitan dalam membawa hasil panen dan mobilisasi alat-alat pertanian…" (Wawancara, 28 Januari 2026).

Selain menghambat aktivitas pertanian, kondisi jalan yang tidak memadai juga berdampak pada meningkatnya biaya transportasi. Kendaraan tidak dapat mengangkut hasil panen secara maksimal sehingga harus bolak-balik, yang pada akhirnya meningkatkan ongkos angkut. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Syawal. Bahkan, kerusakan jalan juga menyebabkan kendaraan petani cepat rusak, sehingga menambah beban biaya perawatan, sebagaimana diungkapkan oleh petani bahwa motor yang digunakan ke kebun sering mengalami kerusakan dan boros bahan bakar akibat kondisi jalan yang buruk.

Dampak lainnya adalah meningkatnya ketergantungan petani terhadap tengkulak. Keterbatasan akses dan sarana transportasi membuat petani tidak mampu mengangkut hasil panen sendiri ke pasar, sehingga terpaksa menjual kepada tengkulak yang memiliki kendaraan. Bahkan petani mengakui bahwa mereka memilih menjual ke tengkulak meskipun dengan keuntungan yang lebih kecil karena hasil panen dijemput langsung ke kebun dan lebih praktis. Hal ini diungkapkan oleh salah satu ketua kelompok tani,

"kami para petani terpaksalah menjualnya ke tengkulak karena hasil panennya langsung di jemput ke kebun kalau kami yang mengangkut sendiri pakai motor itu sulit karena jalannya rusak, itu pun bisa berhari-hari jadinya selesai di angkut, kalau pengangkutan lama/terlambat kualitas panennya menurun seperti jagung contohnya kalau sudah berhari-hari di dalam karung bisa-bisa berkecambah tentu harganya jadi turun, sangat beresiko kecelakaan kalau dipaksakan di langsir pake motor kalau kondisi jalannya seperti itu jadi kami memilih menjualnya ke tengkulak biar pun untungnya sedikit …" (Wawancara, 02 Februari 2026).

Akumulasi dari berbagai permasalahan tersebut berdampak pada menurunnya pendapatan dan kesejahteraan petani. Tingginya biaya transportasi, rendahnya harga jual akibat

ketergantungan pada tengkulak, serta penurunan kualitas hasil panen karena keterlambatan distribusi menyebabkan pendapatan petani berkurang. Bahkan dalam kondisi tertentu, hasil pertanian hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan petani masih harus berhutang untuk modal usaha berikutnya. Dengan demikian, belum optimalnya pembangunan jalan usaha tani secara langsung berdampak terhadap rendahnya kesejahteraan petani di Nagari Lansek Kadok Barat.

PEMBAHASAN

Pembahasan dalam penelitian ini difokuskan pada evaluasi kebijakan penyediaan jalan usaha tani (JUT), faktor-faktor penghambat implementasi, serta dampak kebijakan terhadap kesejahteraan petani di Nagari Lansek Kadok Barat. Jalan usaha tani merupakan infrastruktur strategis yang memiliki keterkaitan langsung dengan produktivitas sektor pertanian dan kondisi sosial ekonomi masyarakat pedesaan. Dalam konteks pembangunan pertanian, keberadaan akses jalan yang memadai tidak hanya berfungsi sebagai sarana mobilitas, tetapi juga sebagai faktor penentu efisiensi distribusi hasil pertanian sehingga itu, kebijakan penyediaan JUT seharusnya menjadi prioritas dalam pembangunan nagari. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini belum berjalan optimal. Hal ini terlihat dari kondisi jalan yang masih rusak serta belum meratanya pembangunan di seluruh wilayah. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan kebijakan dan realisasi di lapangan. Pembahasan ini tidak hanya menyoroti kondisi empiris, tetapi juga mengkaitkannya dengan teori evaluasi kebijakan publik. Pendekatan ini penting agar analisis yang dihasilkan lebih komprehensif dan kritis. Selain itu, pembahasan juga diperkuat dengan temuan penelitian terdahulu yang relevan.

Berdasarkan evaluasi semu (*pseudo evaluation*), dapat diketahui bahwa aparatur nagari telah memiliki pemahaman yang cukup baik terhadap kebijakan penyediaan jalan usaha tani. Pemahaman tersebut tercermin dari adanya proses perencanaan yang sistematis, seperti penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nagari. Dalam proses tersebut, masyarakat, khususnya kelompok tani, diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan pembangunan jalan usaha tani. Hal ini menunjukkan bahwa secara konseptual, pemerintah nagari telah memahami pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Namun demikian, kondisi faktual di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar jalan usaha tani

masih dalam kondisi rusak. Jalan yang berlubang, licin, dan berlumpur menjadi hambatan utama dalam aktivitas pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman yang baik belum diikuti oleh implementasi yang optimal. Menurut (Dunn, 2016), evaluasi semu hanya menggambarkan kondisi empiris tanpa menilai kesesuaiannya dengan tujuan kebijakan. Maka dari itu, hasil evaluasi semu dalam penelitian ini menunjukkan adanya gap antara "apa yang dipahami" dan "apa yang terjadi". Kesenjangan ini menjadi indikasi awal adanya masalah dalam implementasi kebijakan.

Jika dilihat dari evaluasi formal, kebijakan penyediaan jalan usaha tani di Nagari Lansek Kadok Barat belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam regulasi. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52 Tahun 2018 menekankan bahwa pembangunan JUT harus mampu meningkatkan aksesibilitas, efisiensi distribusi, serta kesejahteraan petani. Namun dalam praktiknya, pembangunan jalan usaha tani masih bersifat parsial dan belum menjangkau seluruh wilayah. Data lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar jalan usaha tani mengalami kerusakan cukup parah dan belum mendapatkan perbaikan secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan kebijakan belum tercapai secara optimal. Selain itu, pembangunan yang dilakukan masih bersifat bertahap dan tergantung pada ketersediaan anggaran. Penelitian oleh (Dwi et al., 2021) juga menyatakan bahwa keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam pembangunan infrastruktur desa. Kondisi ini memperkuat temuan penelitian bahwa faktor fiskal menjadi hambatan utama. Dengan demikian, secara formal kebijakan sudah tepat, tetapi implementasinya masih belum maksimal. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap efektivitas kebijakan.

Dalam perspektif evaluasi keputusan teoritis, kebijakan yang diambil seharusnya mempertimbangkan kebutuhan nyata masyarakat, khususnya petani sebagai kelompok sasaran. Berdasarkan hasil penelitian, kondisi jalan usaha tani yang rusak berdampak langsung terhadap aktivitas pertanian. Petani mengalami kesulitan dalam mengakses lahan, mengangkut hasil panen, serta memobilisasi alat pertanian. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya biaya produksi dan menurunnya efisiensi usaha tani. Selain itu, ketergantungan terhadap tengkulak juga meningkat karena petani tidak mampu mengangkut hasil panen secara mandiri. Dalam penelitian (Triyono, 2019), menjelaskan evaluasi keputusan teoritis menekankan pentingnya pemilihan alternatif kebijakan yang paling menguntungkan masyarakat. Dalam konteks ini, kebijakan yang ada belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan petani sehingga diperlukan

alternatif kebijakan seperti peningkatan alokasi anggaran dan dukungan dari pemerintah daerah. Selain itu, keterlibatan dinas terkait juga perlu ditingkatkan.

Faktor utama yang menyebabkan belum optimalnya kebijakan adalah keterbatasan anggaran. Dana nagari yang tersedia harus dibagi untuk berbagai kebutuhan pembangunan, sehingga alokasi untuk jalan usaha tani menjadi terbatas. Selain itu, adanya kebijakan efisiensi anggaran juga berdampak pada berkurangnya dana untuk pembangunan fisik. Hal ini menyebabkan pembangunan jalan usaha tani dilakukan secara bertahap dan tidak merata. Berdasarkan wawancara, pemerintah nagari menyatakan bahwa pembangunan harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang ada. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran menjadi kendala struktural dalam implementasi kebijakan. Penelitian (Putra, 2020) juga menunjukkan bahwa kualitas dan kuantitas infrastruktur sangat dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran. Selain itu, keterbatasan dana juga berdampak pada kualitas pembangunan yang kurang optimal. Jalan yang dibangun cenderung cepat rusak, terutama saat musim hujan.

Selain keterbatasan anggaran, prioritas penggunaan dana desa juga menjadi faktor penting. Dana desa tidak hanya digunakan untuk pembangunan jalan usaha tani, tetapi juga untuk berbagai kebutuhan lain seperti kesehatan, pendidikan, dan operasional nagari. Hal ini menyebabkan pemerintah nagari harus menetapkan skala prioritas dalam penggunaan anggaran. Dalam beberapa kasus, pembangunan jalan usaha tani tidak menjadi prioritas utama. Akibatnya, pembangunan dilakukan secara bertahap dan belum menjangkau seluruh wilayah. Penelitian (Noviyanti et al., 2018) menunjukkan bahwa penentuan prioritas anggaran sangat mempengaruhi keberhasilan pembangunan desa. Selain itu, kondisi ini juga menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah. Beberapa wilayah mendapatkan pembangunan lebih dahulu, sementara yang lain harus menunggu. Dengan demikian, prioritas anggaran menjadi faktor yang mempengaruhi lambatnya pembangunan JUT. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih seimbang dalam pengalokasian dana.

Minimnya dukungan dari pemerintah kabupaten juga menjadi kendala yang signifikan. Berdasarkan hasil wawancara, kelompok tani telah beberapa kali mengajukan proposal pembangunan jalan usaha tani, namun belum mendapatkan realisasi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dan respons pemerintah daerah. Selain itu, koordinasi antara pemerintah nagari dan kabupaten juga belum berjalan optimal. Dukungan dari pemerintah kabupaten sangat penting, terutama dalam hal pembiayaan yang

membutuhkan anggaran besar. Penelitian (Febriantini et al., 2020) menunjukkan bahwa koordinasi antar lembaga sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Tanpa koordinasi yang baik, program pembangunan sulit berjalan efektif. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sinergi antara pemerintah nagari dan kabupaten. Hal ini penting untuk mempercepat realisasi pembangunan.

Ketergantungan terhadap bantuan pemerintah kabupaten juga menjadi faktor penghambat lainnya. Pemerintah nagari belum mampu membiayai pembangunan secara mandiri, sehingga sangat bergantung pada bantuan eksternal. Ketika bantuan tidak terealisasi, pembangunan menjadi terhambat. Kondisi ini menunjukkan rendahnya kemandirian fiskal nagari. Penelitian (Kiki, 2018) menyatakan bahwa ketergantungan terhadap bantuan eksternal dapat menghambat pembangunan daerah. Selain itu, ketergantungan ini juga menyebabkan perencanaan pembangunan menjadi tidak stabil. Pemerintah nagari tidak dapat memastikan kapan pembangunan dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kemandirian nagari. Salah satunya melalui optimalisasi sumber pendapatan lokal.

Dampak dari kondisi tersebut sangat dirasakan oleh petani, terutama dalam aktivitas pertanian sehari-hari. Jalan yang rusak menyebabkan petani kesulitan mengakses lahan pertanian. Berdasarkan wawancara, petani menyatakan bahwa jalan menjadi licin dan sulit dilalui saat musim hujan. Kondisi ini menyebabkan waktu tempuh menjadi lebih lama dan tenaga yang dikeluarkan semakin besar. Selain itu, mobilisasi alat dan sarana produksi juga menjadi terhambat. Penelitian (Suwardi, 2020) menunjukkan bahwa akses jalan memiliki pengaruh signifikan terhadap produktivitas pertanian. Dengan demikian, kondisi jalan yang buruk berdampak langsung terhadap aktivitas petani. Hal ini menunjukkan pentingnya infrastruktur dalam mendukung sektor pertanian sehingga perbaikan jalan menjadi kebutuhan yang mendesak.

Selain itu, biaya transportasi juga meningkat akibat kondisi jalan yang rusak. Kendaraan tidak dapat membawa muatan secara maksimal sehingga harus melakukan perjalanan berulang. Hal ini menyebabkan biaya operasional menjadi lebih tinggi. Berdasarkan wawancara, petani menyatakan bahwa ongkos angkut menjadi lebih mahal karena kondisi jalan yang buruk. Selain itu, kendaraan juga lebih cepat rusak sehingga membutuhkan biaya perawatan tambahan. Penelitian (Sulistyorini, 2021) menunjukkan bahwa biaya transportasi sangat dipengaruhi oleh kondisi infrastruktur. Dengan demikian, jalan yang rusak meningkatkan beban biaya petani.

Kondisi ini menyebabkan keuntungan yang diperoleh menjadi berkurang sehingga perbaikan jalan sangat penting untuk efisiensi biaya.

Ketergantungan terhadap tengkulak juga meningkat sebagai dampak dari keterbatasan akses jalan. Petani tidak mampu mengangkut hasil panen secara mandiri sehingga bergantung pada tengkulak. Berdasarkan wawancara, petani menyatakan bahwa mereka terpaksa menjual hasil panen kepada tengkulak karena keterbatasan transportasi. Tengkulak biasanya membeli hasil panen dengan harga yang lebih rendah. Hal ini menyebabkan posisi tawar petani menjadi lemah. Penelitian (Hardian, 2024) menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap tengkulak merugikan petani dalam jangka panjang. Dengan demikian, kondisi ini memperburuk kesejahteraan petani dan diperlukan perbaikan akses agar petani lebih mandiri.

Pada akhirnya, dampak terbesar dari kondisi ini adalah menurunnya pendapatan dan kesejahteraan petani. Biaya yang meningkat dan harga jual yang rendah menyebabkan pendapatan petani berkurang. Selain itu, keterlambatan pengangkutan juga menyebabkan penurunan kualitas hasil panen. Berdasarkan wawancara, petani menyatakan bahwa hasil panen bisa rusak jika terlalu lama diangkut. Kondisi ini menyebabkan harga jual menjadi lebih rendah. Penelitian (Pratama, 2022) menunjukkan bahwa infrastruktur memiliki pengaruh besar terhadap kesejahteraan petani. Dengan demikian, kondisi jalan usaha tani yang buruk berdampak langsung terhadap ekonomi petani. Hal ini menunjukkan pentingnya perbaikan infrastruktur sehingga kebijakan yang lebih efektif sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam pembahasan sebelumnya serta hasil temuan lapangan, dapat disimpulkan beberapa hal terkait evaluasi kebijakan penyediaan Jalan Usaha Tani (JUT) di Nagari Lansek Kadok Barat, sebagi berikut : 1) Evaluasi kebijakan penyediaan jalan usaha tani menunjukkan bahwa secara umum kebijakan telah dipahami dengan baik oleh aparatur nagari dan telah direncanakan melalui mekanisme yang partisipatif seperti Musrenbang Nagari. Namun, berdasarkan evaluasi semu, kondisi faktual di lapangan masih menunjukkan banyak jalan usaha tani yang rusak dan belum memadai. Sementara itu, dalam evaluasi keputusan teoritis, kondisi jalan usaha tani yang belum memadai berdampak besar terhadap aktivitas pertanian, biaya produksi, hingga kesejahteraan petani. 2) Faktor-faktor penyebab belum optimalnya pelaksanaan kebijakan penyediaan jalan usaha tani di Nagari Lansek Kadok Barat

terdiri dari beberapa aspek utama. Pertama, keterbatasan anggaran yang dimiliki nagari menyebabkan pembangunan jalan usaha tani tidak dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Kedua, adanya prioritas penggunaan dana desa untuk berbagai kebutuhan lain membuat pembangunan jalan usaha tani tidak selalu menjadi fokus utama. Ketiga, minimnya dukungan dan koordinasi dari pemerintah kabupaten menyebabkan usulan pembangunan yang diajukan belum terealisasi secara optimal. Keempat, tingginya ketergantungan terhadap bantuan pemerintah kabupaten dan provinsi membuat pembangunan jalan usaha tani menjadi terhambat ketika bantuan tersebut tidak tersedia. 3) Dampak belum optimalnya kebijakan jalan usaha tani sangat dirasakan oleh petani, baik dalam aspek aktivitas pertanian maupun kondisi ekonomi. Petani mengalami kesulitan dalam mengakses lahan dan mengangkut hasil panen akibat kondisi jalan yang rusak. Selain itu, biaya transportasi dan operasional meningkat karena kendaraan tidak dapat beroperasi secara maksimal. Kondisi ini juga menyebabkan meningkatnya ketergantungan petani terhadap tengkulak.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting baik secara teoritis maupun praktis dalam kajian kebijakan publik, khususnya dalam bidang pembangunan pertanian berbasis infrastruktur pedesaan. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya penerapan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn melalui pendekatan evaluasi semu, formal, dan keputusan teoritis dalam konteks kebijakan jalan usaha tani. Secara praktis, penelitian ini memberikan gambaran empiris mengenai kondisi nyata implementasi kebijakan di tingkat nagari, termasuk faktor penghambat dan dampaknya terhadap kehidupan petani. Selain itu, penelitian ini juga memberikan masukan bagi pemerintah nagari, kecamatan, dan kabupaten dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengambil kebijakan dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pertanian. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam mendorong terciptanya kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Rekomendasi penelitian selanjutnya disarankan 1) Peningkatan dukungan anggaran untuk pembangunan jalan usaha tani Pemerintah daerah, khususnya kabupaten dan provinsi, diharapkan dapat meningkatkan alokasi anggaran untuk pembangunan dan perbaikan jalan usaha tani. Hal ini penting karena keterbatasan anggaran menjadi faktor utama terhambatnya pembangunan, sehingga dengan adanya tambahan dukungan dana, pembangunan dapat dilakukan secara lebih merata dan berkelanjutan. 2) Penetapan prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan petani Pemerintah nagari diharapkan dapat menetapkan skala prioritas pembangunan jalan usaha tani berdasarkan tingkat kerusakan dan urgensi kebutuhan petani.

Dengan demikian, pembangunan yang dilakukan dapat lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung bagi aktivitas pertanian serta kesejahteraan petani. 3) Peningkatan akses dan kemandirian petani dalam distribusi hasil panen Perbaikan jalan usaha tani perlu dipercepat agar petani dapat mengangkut dan memasarkan hasil panen secara mandiri tanpa bergantung pada tengkulak. Selain itu, perlu adanya penguatan peran kelompok tani agar petani memiliki alternatif dalam distribusi hasil pertanian, sehingga posisi tawar petani dapat meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

D, S., Andita, L., Fathony, M., & Akutasi, L. (2021). Infrastruktur Desa dan Tantangan Pembangunan untuk Menuju Desa Ekonomi dan Maju. *Jurnal Pembangunan Desa Dan Kebijakan Publik, 5*(2), 19–36.

Dunn, W. N. (2016). *Public policy analysis*. Routledge.

Fauzan, A. (2024). Model Implementasi Kebijakan Publik. *Innovative: Journal Of Social Science Research, 4*(3), 17929–17938. https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.12674

Febriantini, K. T., Indriani, N. K., Kusuma, B. O., & Yuniari, N. K. Y. (2019). Sinergitas Pemerintah Desa dan Kelembagaan Lokal Subak dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Subak sebagai Warisan Budaya Dunia (Studi Kasus: Subak Jatiluwih, Kabupaten Tabanan). *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik, 14*(2), 189–201. https://doi.org/10.20961/sp.v14i2.39295

Harahap, N. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif* (D. H. S. M.A, Ed.; Pertama). Wal ashri Publishing.

Hardian, E., Alwi, L. O., & Hidrawati. (2024). Ketergantungan Petani Sayuran Terhadap Tengkulak sebagai Patron-Klien dalam Kegiatan Pertanian (Studi Kasus Desa Wakuli Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton). *Jurnal Ilmiah Penyuluhan Dan Pengembangan Masyarakat, 4*(1), 36–42. https://jippm.uho.ac.id/index.php/e_penyuluhan/article/view/4

Jayachandran, S. (2022). How economic development influences the environment. *Annual Review of Economics, 14*(1), 229–252. https://doi.org/10.1146/annurev-economics-082321-123803

Jazuli, A., Salsabila, A. Y., Assidiqi, A. H., & Sadiyah, D. (2023). The strategy of the head of madrasah in cultivating Fastabiqul Khoirot culture in the state high school environment in Batu City. *Education and Human Development Journal, 8*(2), 56–65. https://journal2.unusa.ac.id/index.php/EHDJ/article/view/4849

Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 52/Permentan/RC.240/12/2018 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/161052/permentan-no-52permentanrc240122018-tahun-2018

Kiki, E. (2018). Mewujudkan Kemandirian Desa melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 4*(4), 25–33. https://jurnal.unigal.ac.id/moderat/article/view/1777

Moleong, L. J. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.

Mubyarto. (2014). *Pengantar Ekonomi Pertanian*. LP3ES.

Noviyanti, N., Gamaputra, G., Lestari, Y., & Utami, D. A. (2018). Pengidentifikasian Pendapatan dan Prioritas Penggunaan Dana Desa. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 3*(2), 112–121. https://doi.org/10.26905/pjiap.v3i2.2378

Pratama, Y. (2022). Infrastruktur dan Kesejahteraan Petani. *Jurnal Sosial Ekonomi, 11*(2), 114–136.

Putra, A. (2020). Pengaruh Anggaran terhadap Kualitas Infrastruktur di Desa Guta. *Jurnal Ekonomi Pembangunan, 8*(1), 78–85.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (26th ed.). Alfabeta.

Sulistyorini, R. (2021). Peran Infrastruktur Transportasi dalam Pengembangan Provinsi Lampung. *Jurnal Transportasi, 21*(1), 55–62. https://doi.org/10.26593/jtrans.v21i1.4829.55-62

Suwardi, A. (2011). Pengeluaran Pemerintah Daerah, Produktivitas Pertanian, dan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, 12*(1), 39–55. https://doi.org/10.21002/jepi.v12i1.04

Triyono, N., Kalangi, L., & Alexander, S. (2019). Evaluasi Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 7*(3), 4017–4025. https://doi.org/10.35794/emba.v7i3.24941

Yalamala, R. S. (2020). Whose reality counts? Emergent Dalitbahujan anthropologists. *Anthropology in Action, 27*(1), 14–23. https://doi.org/10.3167/aia.2020.270102